



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. RA. Kartini No. 1 Telp. (0285) 391571 Fax. 391051 Batang 51215

PENGUMUMAN
NOMOR : 810/ 283 /2019
TENTANG

SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2019
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

DASAR :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 403 Tahun 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2019;
6. Keputusan Bupati Batang Nomor 871/622/2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2019.

Dengan ini diberitahukan bahwa Pemerintah Kabupaten Batang akan menyelenggarakan seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang dengan ketentuan sebagai berikut :

A. KETENTUAN DAN PERSYARATAN UMUM.

1. Warga Negara Indonesia;
2. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar, dikecualikan untuk jabatan Dokter Spesialis usia paling tinggi 40 (empat puluh tahun) tahun saat melamar;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk Badan Usaha Milik Negara/Daerah);
5. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
9. Berkelakuan baik;

10. Tidak pernah mengonsumsi/menggunakan narkoba, psiktropika, prekursor dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan dokter pemerintah;
11. Pelamar hanya dapat mendaftar 1 (satu) kali di portal nasional Seleksi CPNS 2019;
12. Pelamar merupakan lulusan dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang sudah terdaftar di Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Kementerian Agama atau lulusan dari Perguruan Tinggi dan Program Studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
13. Peserta seleksi yang dinyatakan lulus wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan pada instansi yang bersangkutan dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak TMT PNS, dan apabila tetap mengajukan pindah sebelum waktu yang telah ditetapkan, maka dianggap mengundurkan diri; dan
14. Bagi peserta seleksi CPNS tahun 2018 yang dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan telah mendapatkan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari BKN, kemudian mengundurkan diri, maka yang bersangkutan tidak dapat mendaftar pada seleksi pengadaan CPNS tahun 2019.

B. PERSYARATAN KHUSUS.

1. Pelamar yang mendaftar pada formasi jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR), wajib melampirkan STR (bukan internship dan bukan Wajib Kerja Dokter Spesialis-WKDS) sesuai jabatan yang dilamar (linier) yang masih berlaku dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR (bukan surat keterangan proses perpanjangan/pembuatan STR) pada saat pendaftaran, dan masih tetap berlaku sampai proses pemberkasan pengangkatan CPNS;
2. Pelamar pada formasi jabatan Guru yang memiliki sertifikasi pendidik sesuai dengan jabatan guru yang dilamar (linier), yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Agama, akan diberikan nilai maksimal SKB;
3. Pelamar Disabilitas :
 - a. Disabilitas adalah pelamar yang berkebutuhan khusus/memiliki keterbatasan fisik dengan kriteria :
 - 1) Mampu melihat, mendengar dan berbicara dengan baik;
 - 2) Mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi;
 - 3) Mampu bergerak dengan menggunakan alat bantu berjalan selain kursi roda.
 - b. Calon pelamar wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis/ derajat kedisabilitasannya;
 - c. Khusus bagi pelamar disabilitas harus bersedia hadir pada saat verifikasi persyaratan untuk memastikan kesesuaian formasi dengan jenis/derajat disabilitas yang disandang sesuai undangan dari panitia seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Batang;
 - d. Bagi pelamar disabilitas yang melamar pada Formasi Umum dan Formasi Khusus selain Formasi Disabilitas, namun tidak melampirkan dokumen/surat keterangan yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya, dan di kemudian hari terbukti bahwa calon pelamar tersebut adalah benar sebagai penyandang disabilitas maka Panitia dapat menggugurkan keikutsertaan/ kelulusan yang bersangkutan;
4. Kategori P1/TL
 - a. Pelamar dari kategori P1/TL adalah peserta seleksi penerimaan CPNS tahun 2018 dan memenuhi nilai ambang batas/passing grade berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018

tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 serta masuk dalam 3 (tiga) kali formasi jabatan yang dilamar untuk dapat mengikuti SKB tahun 2018, namun dinyatakan tidak lulus sampai dengan tahap akhir.

- b. Peserta PI/TL dapat mendaftar dan mengikuti seleksi CPNS tahun 2019 dengan menggunakan kualifikasi pendidikan yang sama saat melamar sebagai CPNS Tahun 2018, pada jabatan dan instansi yang diinginkan baik sama ataupun tidak sama dengan yang dilamar saat mendaftar sebagai CPNS Tahun 2018;
- c. Peserta P1/TL sebagaimana dimaksud pada angka 2, diberikan peluang menggunakan nilai terbaik antara nilai SKD Tahun 2018 dan nilai SKD Tahun 2019, sebagai dasar untuk dapat mengikuti tahap SKB selanjutnya.
- d. Data Peserta P1/TL sebagaimana dimaksud pada angka 3, didasarkan pada basis data hasil SKD tahun 2018 yang disimpan dalam SSCASN BKN;
- e. Pengaturan Terhadap Peserta Seleksi Yang Termasuk Kategori P1/TL
 - 1) Pelamar dari P1/TL wajib mendaftar di SSCASN dengan menggunakan NIK yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi CPNS Tahun 2018 dan dilakukan proses pendaftaran/pengunggahan dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan oleh instansi yang dilamarnya. Instansi selanjutnya melakukan seleksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan apabila yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan administrasi maka dapat digugurkan.
 - 2) Sistem SSCASN BKN akan menampilkan data pelamar P1/TL tersebut mencakup jenis formasi yang dilamar, kualifikasi pendidikan, nilai SKD Tahun 2018, status masuk atau tidak pada 3 (tiga) kali formasi pada jabatan yang dilamar, dan status lulus atau tidak sampai dengan tahap akhir pada seleksi CPNS tahun 2018.
 - 3) Pelamar dari P1/TL memilih jabatan dan jenis formasi yang akan dilamar. Secara sistem, nilai SKD tahun 2018 sah digunakan oleh pelamar apabila:
 - a) Nilai SKD tahun 2018 memenuhi nilai ambang batas/passing grade SKD tahun 2019 untuk jabatan dan jenis formasi yang akan dilamarnya;
 - b) Kualifikasi pendidikan pada formasi jabatan yang dilamar tahun 2019 harus sama dengan kualifikasi pendidikan yang telah digunakan pada saat pelamaran tahun 2018.
 - 4) Pelamar dari P1/TL harus memilih untuk mengikuti atau tidak mengikuti SKD Tahun 2019 pada sistem SSCASN.
 - 5) Bagi pelamar P1/TL yang memilih untuk mengikuti SKD Tahun 2019, kemudian tidak mengikuti SKD, dinyatakan gugur.
 - 6) Bagi pelamar P1/TL yang memilih untuk tidak mengikuti SKD Tahun 2019, maka nilai SKD yang digunakan adalah nilai SKD Tahun 2018.
 - 7) Apabila nilai SKD Tahun 2019 yang diperoleh pelamar memenuhi nilai ambang batas/passing grade SKD tahun 2019 untuk formasi jabatan yang dilamarnya, maka nilai SKD yang digunakan adalah nilai terbaik antara nilai SKD Tahun 2018 dengan nilai SKD Tahun 2019.
 - 8) Apabila nilai SKD Tahun 2019 tidak memenuhi nilai ambang batas/passing grade, maka nilai yang digunakan adalah nilai SKD Tahun 2018.
 - 9) Nilai SKD peserta P1/TL sebagaimana dimaksud pada angka 6 atau angka 7 atau angka 8, akan diperingkat dengan nilai SKD dari peserta Seleksi CPNS Tahun 2019 lainnya yang memenuhi nilai ambang batas/passing grade pada jenis formasi dan jabatan yang dilamar untuk menentukan peserta yang dapat mengikuti SKB paling banyak 3 (tiga) kali formasi berdasarkan peringkat tertinggi.

C. JENIS JABATAN, JUMLAH FORMASI YANG DIBUTUHKAN DAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG DIPERSYARATKAN

Alokasi formasi sebanyak 244 dengan rincian:

1. Tenaga Guru : 55
2. Tenaga Kesehatan : 30
3. Tenaga Teknis : 159

Secara terperinci sebagaimana lampiran II dan lampiran III pengumuman ini.

D. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pengumuman lowongan formasi yang dibutuhkan pada penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Batang dapat dilihat pada situs <https://batangkab.go.id/> dan <https://sscasn.bkn.go.id/>;
2. Calon pelamar seleksi penerimaan CPNSD wajib memiliki surat elektronik (email) yang masih aktif/berlaku dan wajib mempersiapkan NIK (Nomor Induk Kependudukan), Nomor Kartu Keluarga, dan/atau NIK Kepala Keluarga yang tercantum sesuai pada Kartu Keluarga calon pelamar;
3. Pendaftaran dan unggahan dokumen persyaratan dilakukan secara online melalui situs SSCASN 2019 di <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan menggunakan NIK (Nomor Induk Kependudukan), Nomor Kartu Keluarga, dan/atau NIK Kepala Keluarga (NIK KK);
4. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga calon pelamar, agar menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai KTP pelamar;
5. Jika pelamar telah berhasil melakukan pendaftaran ke Portal SSCASN 2019 selanjutnya harus mencetak Kartu Informasi Akun sebagai bukti bahwa pelamar berhasil mendaftar ke Portal SSCN 2019, dan kartu tersebut agar disimpan dengan baik;
6. Dokumen persyaratan yang harus diunggah melalui situs <https://sscasn.bkn.go.id> terdiri dari:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan perekaman data kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - b. Foto terbaru ukuran 3 x 4 tampak depan dengan latar belakang merah;
 - c. Swafoto / selfie dengan menunjukkan kartu informasi akun SSCASN 2019 dan KTP/Surat Keterangan dengan data pada kartu menghadap kamera;
 - d. Asli ijazah yang dipersyaratkan;
 - e. Asli transkrip nilai dari ijazah yang dipersyaratkan;
 - f. Asli surat lamaran yang ditujukan kepada Bupati Batang, diketik menggunakan komputer, bermeterai Rp 6.000,- dan ditandatangani dengan tinta hitam, sebagaimana format yang dapat diunduh pada situs <https://batangkab.go.id/>;
 - g. Dokumen lain-lain:
 - 1) Surat Akreditasi PTN maupun PTS yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
 - 2) Bagi tenaga kesehatan :
 - a) Surat Tanda Registrasi (STR) bagi tenaga kesehatan sesuai dengan keahliannya yang dikeluarkan oleh :
 - (1) Bagi tenaga Dokter/Dokter Spesialis/Dokter Gigi/Dokter Gigi Spesialis dikeluarkan oleh Komisi Kedokteran Indonesia (KKI)/Konsil Kedokteran Gigi Indonesia (KKGII), bukan STR Internsip;

(2) Bagi tenaga Kesehatan lainnya dikeluarkan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) atau Lembaga/Instansi yang berwenang.

b) Asli Surat Keterangan yang menyatakan dan tertulis "tidak buta warna", dari dokter rumah sakit pemerintah.

3) Khusus bagi penyandang disabilitas melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis/derajat kedisabilitasnya;

4) Khusus bagi pelamar jabatan tenaga guru yang telah memiliki sertifikat pendidik sesuai dengan jabatan guru yang dilamar (linear) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama atau Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, wajib dilampirkan;

h. Dokumen lain-lain digabungkan dalam satu file sesuai ketentuan dalam SSCASN:

1) Asli/Copy Surat Akreditasi PTN maupun PTS yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;

2) Asli Surat Tanda Registrasi (STR) tenaga kesehatan harus sesuai dengan keahliannya yang dikeluarkan oleh:

a) Bagi tenaga Dokter/Dokter Spesialis/Dokter Gigi/Dokter Gigi Spesialis dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) / Konsil Kedokteran Gigi Indonesia (KKGI);

b) Bagi tenaga Kesehatan lainnya dikeluarkan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) atau Lembaga/Instansi yang berwenang.

c) Untuk jabatan Administrator Kesehatan tidak diwajibkan melampirkan STR.

7. Semua informasi atau data dalam formulir pendaftaran diisikan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan dokumen asli. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka pelamar dinyatakan gugur dan tidak diproses lebih lanjut.

E. PERSYARATAN PENDAFTARAN

1. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) dalam skala 4,00 (empat koma nol-nol), kecuali untuk jabatan dengan kualifikasi pendidikan SMK;

2. Pelamar Jabatan Tenaga Kesehatan :

a. Wajib melampirkan Asli Surat Keterangan tidak buta warna dari dokter pemerintah;

b. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) bukan STR Internsip dan bukan Wajib Kerja Dokter Spesialis-WKDS) sesuai jabatan yang dilamar (linier);

c. untuk Jabatan Administrator Kesehatan tidak dipersyaratkan STR.

F. PELAKSANAAN SELEKSI ADMINISTRASI

1. Seleksi administrasi berdasarkan hasil verifikasi dokumen pada situs <https://sscasn.bkn.go.id/>;

2. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian pada situs <https://sscasn.bkn.go.id/>; dan

3. Kartu peserta ujian wajib dibawa pada saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar untuk diverifikasi oleh panitia.

G. PELAKSANAAN SELEKSI DAN PENYAMPAIAN HASIL SELEKSI

1. Jadwal dan tempat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang akan disampaikan melalui situs <https://batangkab.go.id/> dan <https://sscasn.bkn.go.id/>;

2. Materi yang diujikan adalah Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang terdiri dari:
 - a. Tes Intelegensi Umum (TIU);
 - b. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK); dan
 - c. Tes Karakteristik Pribadi (TKP);Pelaksanaan seleksi menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).
3. Prinsip penentuan kelulusan peserta Seleksi Kompetensi Dasar didasarkan pada nilai ambang batas kelulusan (passing grade);
4. Apabila peserta seleksi memperoleh nilai kelulusan yang sama setelah integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang, maka penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
 - a. Nilai total hasil Seleksi Kompetensi Dasar yang lebih tinggi;
 - b. Apabila pada poin (a) masih sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari nilai TKP, TIU, dan TWK;
 - c. Apabila pada poin (b) masih sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai IPK bagi lulusan Diploma/Sarjana/Magister; dan
 - d. Apabila pada poin (c) masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia tertinggi.
5. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), dengan ketentuan:
 - a. Jumlah peserta yang mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang adalah 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing-masing jabatan berdasarkan peringkat nilai Seleksi Kompetensi Dasar;
 - b. Apabila terdapat beberapa peserta yang memperoleh nilai Seleksi Kompetensi Dasar yang sama pada 3 (tiga) komponen sub tes dan berada pada ambang batas jumlah kebutuhan formasi, maka terhadap peserta dimaksud diikutkan Seleksi Kompetensi Bidang; dan
 - c. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang menggunakan sistem CAT.
6. Bobot nilai Seleksi Kompetensi Dasar sebesar 40% dan Seleksi Kompetensi Bidang sebesar 60%;
7. Dalam hal kebutuhan formasi umum tidak terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi khusus pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang bersesuaian serta memenuhi passing grade peringkat terbaik;
8. Dalam hal kebutuhan formasi khusus tidak terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi umum pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang bersesuaian serta memenuhi passing grade peringkat terbaik; dan
9. Kelulusan akhir ditentukan berdasarkan hasil integrasi nilai SKD dan SKB oleh Panitia Seleksi Nasional.

G. LAIN-LAIN.

1. Ujian dilaksanakan dengan sistem **Computer Assisted Test (CAT)**
2. Jadwal pelaksanaan ujian yang meliputi hari, tanggal, jam pelaksanaan, lokasi ujian serta informasi lain, selanjutnya akan disampaikan melalui situs <https://sscasn.bkn.go.id/> dan <https://batangkab.go.id/>;
3. Kelalaian dalam membaca dan memahami pengumuman ini sehingga berakibat pada kerugian pelamar, sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan;

4. Perlengkapan yang dibawa pada waktu Ujian Seleksi :
 - a. Asli Kartu Peserta Ujian Tahun 2019 dan Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.
Peserta yang tidak membawa Asli Kartu Peserta Ujian dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak diperkenankan mengikuti ujian dan dinyatakan gugur;
 - b. Peserta wajib mengenakan pakaian : atasan kemeja warna putih polos (bukan kaos), bawahan hitam/gelap (bukan jeans) serta bersepatu;
Peserta yang tidak mengenakan pakaian sesuai ketentuan, tidak diperkenankan mengikuti ujian dan dinyatakan gugur;
 - c. Selain Kartu Peserta Ujian dan KTP tidak diperbolehkan dibawa masuk ruang ujian (Alat komunikasi, jam tangan, dompet, tas dsb.).
5. Peserta hadir **tepat waktu sesuai jadwal**, peserta yang tidak hadir untuk mengikuti tes sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan alasan apapun, dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan gugur.
6. Pelamar pada formasi jabatan Guru yang memiliki sertifikasi pendidik sesuai dengan jabatan guru yang dilamar (linier), yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Agama, akan diberikan nilai maksimal SKB;
7. Formasi Umum atau Formasi Khusus selain Formasi Disabilitas tidak dapat dilamar oleh penyandang disabilitas kecuali formasi yang diberi keterangan "dapat diisi disabilitas".
8. Peserta seleksi yang sedang dalam proses mengikuti program beasiswa (seperti LPDP) dan telah ditetapkan sebagai CPNS dapat melanjutkan program beasiswanya setelah yang bersangkutan berstatus PNS
9. Apabila setelah dilakukan pengumuman seleksi administrasi terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil seleksi administrasi;
10. **Jika peserta yang dinyatakan lulus apabila pada saat melengkapi persyaratan administrasi tidak bisa menunjukkan dokumen asli atau terbukti ditemukan adanya pemalsuan dokumen, akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta secara otomatis dianggap gugur;**
11. Seluruh tahapan pelaksanaan seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun dan keputusan Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
12. Kepada masyarakat agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
13. Pemerintah Kabupaten Batang tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;

IX. TAHAPAN PELAKSANAAN.

NO	TAHAPAN	TANGGAL
1	Pengumuman	10 November 2019
2	Pendaftaran	11 - 25 November 2019 (menyesuaikan SSCASN)
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	lihat di situs https://batangkab.go.id atau https://sscasn.bkn.go.id
4	Masa Sanggah	
5	Pengumuman Jadwal SKD	
6	Pelaksanaan SKD	
7	Pengumuman Hasil SKD	
8	Pelaksanaan SKB	
9	Integrasi Nilai SKD dan SKB	
10	Penetapan NIP dan Pengangkatan sebagai CPNS	

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui pelamar CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang. Apabila hal-hal yang belum jelas dapat menghubungi nomor telepon seluler 085741970337 (hanya dalam bentuk *Whatsapp Chat*) atau telepon (0285) 4493224 pada hari dan jam kerja:

1. Hari Senin s/d Kamis pukul 07.00 s/d 16.00 WIB
2. Hari Jumat pukul 07.00 s/d 11.00 WIB

Dikeluarkan di Batang
pada tanggal 8 November 2019

a.n. BUPATI BATANG
Sekretaris Daerah,
Sebagai Ketua Panitia Seleksi Daerah



Drs. MAS KHIN, M.H.
Pemangku Utama Madya
NIP. 19630403 198903 1 011

Contoh :
SURAT LAMARAN CPNS
FORMASI TAHUN 2019

LAMPIRAN I
PENGUMUMAN
NOMOR 810/283/2019
TENTANG
SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI
SIPII TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Lampiran :
Perihal : Pendaftaran Seleksi Pengadaan PNS
Th. 2019 di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Batang

.....
Kepada Yth. :

BUPATI BATANG
di _
BATANG

Memperhatikan Pengumuman Sekretaris Daerah Kabupaten Batang selaku Ketua Panselda nomor 810/283/2019 tanggal 8 November 2019 tentang Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang, dengan hormat kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Tempat tanggal lahir :
Alamat lengkap :
Pendidikan :
No HP/Telp. :
Alamat e-mail :

Mengajukan permohonan untuk mengikuti Seleksi Pengadaan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang, untuk Jabatan dengan unit kerja penempatan di.....

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan berkas-berkas persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam Pengumuman, yang terdiri:

1. Softfile scan asli Kartu Tanda Penduduk;
2. Softfile pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm tampak depan dengan latar belakang warna merah;
3. Softfile scan swafoto/selfie dengan membawa Kartu Informasi Akun SSCASN 2019 dan KTP/Surat Keterangan;
4. Softfile scan Asli Ijazah sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan;
5. Softfile scan Asli Transkrip Nilai;
6. Softfile scan surat lamaran ditujukan Bupati Batang;
7. Softfile scan dokumen lain sesuai yang dipersyaratkan dalam ketentuan pengumuman;

Demikian permohonan ini saya sampaikan dengan harapan Bapak berkenan mengabulkannya. Jika dikemudian hari ternyata data yang saya sampaikan ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Hormat kami,

Meterai
6000 harus ditandatangani

nama lengkap

LAMPIRAN II
 PENGUMUMAN
 NOMOR 810/283/2019
 TENTANG
 SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN
 2019 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 BATANG

RINCIAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2019
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. BATANG

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	JENIS FORMASI		RENCANA PENEMPATAN
				UMUM	DISABILITAS	
JUMLAH SELURUHNYA			88	82	4	
I. TENAGA PENDIDIKAN			5			
1	AHLI PERTAMA – GURU KELAS	S1 PGSD / S1 PGMI	3	1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, KORWIL BID PENDIDIKAN KEC. TERSONO, KEPALA SDN SUMURBANGER 01, GURU KELAS
				1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, KORWIL BID PENDIDIKAN KEC. WONOTUNGGAL, KEPALA SDN PENANGKAN, GURU KELAS
				1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, KORWIL BID PENDIDIKAN KEC. BAWANG, KEPALA SDN CANDIREJO 01, GURU KELAS
2	AHLI PERTAMA – GURU MATEMATIKA	S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA	2	1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, KEPALA SMPN 3 BAWANG, GURU MATEMATIKA
				1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, KEPALA SMPN 3 BLADO, GURU MATEMATIKA

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	JENIS FORMASI		RENCANA PENEMPATAN
				UMUM	DISABILITAS	
II. TENAGA KESEHATAN			11			
1	AHLI PERTAMA – DOKTER GIGI	DOKTER GIGI	2	1	-	SEKRETARIS DAERAH, DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG, DOKTER GIGI
				1	-	SEKRETARIS DAERAH, DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIMPUNG, DOKTER GIGI
2	AHLI PERTAMA – DOKTER SPESIALIS ANAK	DOKTER SPESIALIS ANAK	1	1	-	SEKRETARIS DAERAH, DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG, DOKTER SPESIALIS ANAK
3	AHLI PERTAMA – DOKTER SPESIALIS ANESTESI	DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI	1	1	-	SEKRETARIS DAERAH, DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIMPUNG, DOKTER SPESIALIS ANESTESI
4	AHLI PERTAMA – DOKTER SPESIALIS BEDAH	DOKTER SPESIALIS BEDAH	1	1	-	SEKRETARIS DAERAH, DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIMPUNG, DOKTER SPESIALIS BEDAH
5	AHLI PERTAMA – DOKTER SPESIALIS KANDUNGAN	DOKTER SPESIALIS KANDUNGAN	1	1	-	SEKRETARIS DAERAH, DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIMPUNG, DOKTER SPESIALIS KANDUNGAN
6	AHLI PERTAMA – DOKTER SPESIALIS MATA	DOKTER SPESIALIS MATA	1	1	-	SEKRETARIS DAERAH, DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIMPUNG, DOKTER SPESIALIS MATA
7	AHLI PERTAMA – DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	1	1	-	SEKRETARIS DAERAH, DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIMPUNG, DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK
8	AHLI PERTAMA – DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	2	1	-	SEKRETARIS DAERAH, DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG, DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM
				1	-	SEKRETARIS DAERAH, DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIMPUNG, DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM
9	AHLI PERTAMA – DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	1	1	-	SEKRETARIS DAERAH, DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIMPUNG, DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	JENIS FORMASI		RENCANA PENEMPATAN
				UMUM	DISABILITAS	
III. TENAGA TEKNIS						
1	AHLI PERTAMA – ANALIS KEPEGAWAIAN	S1 MANAJEMEN SDM/S1 ADMINISTRASI NEGARA/S1 ADMINISTRASI PUBLIK/DIV MANAJEMEN SDM/DIV ADMINISTRASI NEGARA/DIV ADMINISTRASI PUBLIK	2	2	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, ANALIS KEPEGAWAIAN
2	AHLI PERTAMA – ANALIS KEUANGAN PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH	S1 AKUNTANSI/DIV AKUNTANSI	4	4	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH, ANALIS KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
3	AHLI PERTAMA – ASSESSOR SDM APARATUR	S1 PSIKOLOGI/DIV PSIKOLOGI	1	1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, KEPALA BIDANG PENDIDIKAN, PELATIHAN, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI, KEPALA SUB BIDANG JABATAN, ASSESSOR SDM APARATUR
4	AHLI PERTAMA - AUDITOR	S1 AKUNTANSI/DIV AKUNTANSI	3	3	-	SEKRETARIS DAERAH, INSPEKTUR DAERAH, AUDITOR
5	AHLI PERTAMA – PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	S1/DIV TEKNIK SIPIL/S1/DIV TEKNIK ARSITEKTUR/S1/DIV ILMU HUKUM	2	2	-	SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN II BIDANG EKONOMI PEMBANGUNAN, KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA, PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
6	AHLI PERTAMA – PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	S1 ILMU HUKUM/DIV ILMU HUKUM	1	1	-	SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, KEPALA BAGIAN HUKUM, KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN DAN FASILITAS PRODUK HUKUM, PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	JENIS FORMASI		RENCANA PENEMPATAN
				UMUM	DISABILITAS	
7	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S1/DIV TEKNIK LINGKUNGAN/SI/DIV TEKNIK ARSITEKTUR/S1 PLANOLOGI/S1/DIV TEKNIK SIPIL/DIV PLANOLOGI	1	1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH, KEPALA SUB BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PERHUBUNGAN, PERENCANA
8	AHLI PERTAMA - SANDIMAN	S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK/DIV REKAYASA PERANGKAT LUNAK	1	1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT, KEPALA SEKSI KEAMANAN INFORMASI DAN PERSANDIAN, SANDIMAN
9	PELAKSANA/TERAMPIL - SANDIMAN	DIII TEKNIK INFORMATIKA	1	1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT, KEPALA SEKSI KEAMANAN INFORMASI DAN PERSANDIAN, SANDIMAN
10	ANALIS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	DIV TEKNIK PERTANIAN/S1 TEKNIK PERTANIAN/S1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN	1	1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN, KEPALA BIDANG HOLTIKULTURA, KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA HOLTIKULTURA
11	ANALIS BENCANA	S1 PSIKOLOGI/S1 SOSIOLOGI/DIV SOSIOLOGI/DIV PSIKOLOGI	1	1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KEPALA SEKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
12	ANALIS IKLIM USAHA DAN KERJASAMA	S1 EKONOMI MANAJEMEN/S1 EKONOMI PEMBANGUNAN/DIV EKONOMI MANAJEMEN/DIV EKONOMI PEMBANGUNAN	1	1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL, KEPALA SEKSI PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	JENIS FORMASI		RENCANA PENEMPATAN
				UMUM	DISABILITAS	
13	ANALIS JABATAN	S1 MANAJEMEN SDM/S1 PSIKOLOGI/S1 ADMINISTRASI NEGARA/S1 ADMINISTRASI PUBLIK/DIV MANAJEMEN SDM/DIV PSIKOLOGI/DIV ADMINISTRASI NEGARA/DIV ADMINISTRASI PUBLIK	1	1	-	SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN III BIDANG ADMINISTRASI, KEPALA BAGIAN ORGANISASI, KEPALA SUB BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISA JABATAN
14	ANALIS KELEMBAGAAN KURSUS DAN PELATIHAN	S1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN/DIV TEKNOLOGI PENDIDIKAN	1	1 *)	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN, KEPALA BIDANG PELATIHAN, PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, KEPALA SEKSI PENDATAAN, PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA
15	ANALIS KEMASYARAKATAN	S1 ILMU SOSIAL DAN POLITIK/DIV ILMU SOSIAL POLITIK	1	1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK, KEPALA SEKSI KETAHANAN SENI, BUDAYA, AGAMA, KEMASYARAKATAN DAN EKONOMI
16	ANALIS KESEJAHTERAAN KELUARGA	S1 PSIKOLOGI/S1 SOSIOLOGI / DIV PSIKOLOGI/DIV SOSIOLOGI	1	1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, KEPALA BIDANG KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA, KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
17	ANALIS KESEJAHTERAAN RAKYAT	S1 ILMU SOSIAL DAN POLITIK/S1 PSIKOLOGI/S1 SOSIOLOGI/DIV ILMU SOSIAL POLITIK/DIV PSIKOLOGI/DIV SOSIOLOGI	1	1	-	SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KEPALA SUB BAGIAN KESEHATAN DAN SOSIAL

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	JENIS FORMASI		RENCANA PENEMPATAN
				UMUM	DISABILITAS	
18	ANALIS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA	S1 KEBIJAKAN PUBLIK/S1 EKONOMI/S1 ADMINISTRASI NEGARA/DIV ADMINISTRASI NEGARA/DIV ADMINISTRASI PUBLIK/S1 ADMINISTRASI PUBLIK/DIV KEBIJAKAN PUBLIK/DIV EKONOMI/S1 PEMERINTAHAN/DIV PEMERINTAHAN	1	1	-	SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN III BIDANG ADMINISTRASI, , KEPALA BAGIAN ORGANISASI, KEPALA SUB BAGIAN AKUNTABILITAS KINERJA DAN BUDAYA KERJA
19	ANALIS PARIWISATA	S1 PARIWISATA/DIV PARIWISATA	1	1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, KEPALA BIDANG DESTINASI WISATA DAN USAHA WISATA, KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA
20	ANALIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK	S1 PSIKOLOGI/S1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL/DIV PSIKOLOGI/DIV KESEJAHTERAAN SOSIAL	1	1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
21	ANALIS PENGAWASAN MASYARAKAT	S1 ILMU SOSIAL DAN POLITIK/DIV ILMU SOSIAL POLITIK	1	1	-	SEKRETAIS DAERAH, KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK, KEPALA SEKSI POLITIK DAN KEWASPADAAN NASIONAL
22	ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI	S1 PSIKOLOGI/S1 MANAJEMEN SDM/DIV PSIKOLOGI/DIV MANAJEMEN SDM	1	1 *)	-	SEKRETARIS DAERAH, DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIMPUNG, KEPALA SEKSI KEPERAWATAN

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	JENIS FORMASI		RENCANA PENEMPATAN
				UMUM	DISABILITAS	
23	ANALIS PENGEMBANGAN SISTEM OPERASI MEDIS	S1 TEKNIK INFORMATIKA/S1 SISTEM INFORMASI/S1 MANAJEMEN TEKNIK INFORMATIKA/DIV TEKNIK INFORMATIKA/DIV SISTEM INFORMASI/DIV MANAJEMEN TEKNIK INFORMATIKA	1	1	-	SEKRETARIS DAERAH, DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIMPUNG, KEPALA SEKSI PELAYANAN MEDIS
24	ANALIS PEREKONOMIAN	S1 EKONOMI PEMBANGUNAN/S1 EKONOMI MANAJEMEN/DIV EKONOMI PEMBANGUNAN/DIV EKONOMI MANAJEMEN	1	1	-	SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN II BIDANG EKONOMI PEMBANGUNAN, KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN, KEPALA SUB BAGIAN PENINGKATAN PRODUKSI
25	ANALIS PERTANAHAN	S1 SOSIOLOGI/DIV PLANOLOGI/S1 PLANOLOGI/DIV SOSIOLOGI	1	1	-	KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, KEPALA BIDANG PERUMAHAN DAN PERTANAHAN, KEPALA SEKSI PERTANAHAN
26	ANALIS SARANA PROGRAM KELUARGA BERENCANA	DIV KESEHATAN MASYARAKAT/S1 PSIKOLOGI/DIV PSIKOLOGI/S1 KESEHATAN MASYARAKAT	1	1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA, KEPALA SEKSI SARANA PRASARANA KELUARGA BERENCANA
27	ANALIS TAMAN	S1/DIV TEKNIK ARSITEKTUR	1	1	-	KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, KEPALA BIDANG PERMUKIMAN, KEPALA SEKSI PERTAMANAN DAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	JENIS FORMASI		RENCANA PENEMPATAN
				UMUM	DISABILITAS	
28	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	DIII AKUNTANSI/DIII ADMINISTRASI NEGARA/DIII ADMINISTRASI PUBLIK/DIII EKONOMI MANAJEMEN	2	2	-	SEKRETARIS DAERAH, DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIMPUNG, KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
29	PENGELOLA DATA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN	DIII EKONOMI MANAJEMEN/DIII ADMINISTRASI NEGARA/DIII ADMINISTRASI PUBLIK	9	1	-	SEKRETARIS DAERAH, LURAH WATESALIT, KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
				1	-	SEKRETARIS DAERAH, LURAH KASEPUHAN, KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
				-	1	SEKRETARIS DAERAH, LURAH KAUMAN, KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
				1	-	SEKRETARIS DAERAH, LURAH PROYONANGGAN SELATAN, KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
				-	1	SEKRETARIS DAERAH, LURAH PROYONANGGAN TENGAH, KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
				1	-	SEKRETARIS DAERAH, LURAH PROYONANGGAN UTARA, KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
				1	-	SEKRETARIS DAERAH, LURAH KARANGASEM SELATAN, KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
				1	-	SEKRETARIS DAERAH, LURAH KARANGASEM UTARA, KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	JENIS FORMASI		RENCANA PENEMPATAN
				UMUM	DISABILITAS	
				1	-	SEKRETARIS DAERAH, LURAH SAMBONG, KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
30	PENGELOLA KEPERAWATAN	DIII KEPERAWATAN	1	1	-	SEKRETARIS DAERAH, DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIMPUNG
31	PENGELOLA KEUANGAN	DIII AKUNTANSI	17	1	-	SEKRETARIS DAERAH, SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN DPRD, KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
				1	-	SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN III BIDANG ADMINISTRASI, KEPALA BAGIAN UMUM, KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN
				-	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS SOSIAL, KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
				1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN, KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
				2	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN, KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
				1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK, KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
				2	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, SEKRETARIS, KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
				1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, SEKRETARIS, KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	JENIS FORMASI		RENCANA PENEMPATAN
				UMUM	DISABILITAS	
				1	-	SEKRETARIS DAERAH, INSPEKTUR DAERAH, SEKRETARIS, KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM
				1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, SEKRETARIS
				1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, SEKRETARIS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, KEPALA SUB
				2	-	SEKRETARIS DAERAH, DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIMPUNG, KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
				1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
				-	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEPALA UPTD SAMPAH, KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
32	PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DESA	DIII MANAJEMEN ADMINISTRASI	1	1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN KELURAHAN, KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DANA PEMBANGUNA DESA
33	PENGELOLA PROMOSI DAN INFORMASI WISATA	DIII PARIWISATA	1	1	-	KEPALA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, KEPALA BIDANG PEMASARAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, KEPALA SEKSI PROMOSI PARIWISATA
34	PENGELOLA SIM PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU	DIII ADMINSTRASI PERKANTORAN	1	1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KEPALA BIDANG PERIJINAN, KEPALA SEKSI PEMROSESAN DAN PENETAPAN PERIJINAN

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	JENIS FORMASI		RENCANA PENEMPATAN
				UMUM	DISABILITAS	
35	PENYULUH KEPEMUDAAN	S1 ILMU SOSIAL DAN POLITIK/S1 SOSIOLOGI/DIV SOSIOLOGI/DIV ILMU SOSIAL POLITIK	1	1	-	KEPALA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, KEPALA BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, KEPALA SEKSI PEMBINAAN KEPEMUDAAN
36	PENYULUH KOPERASI	S1/DIV EKONOMI MANAJEMEN / S1/DIV EKONOMI PEMBANGUNAN	1	1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, KEPALA BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH, KEPALA SEKSI PENGAWASAN, PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI
37	PENYULUH WISATA	S1 PARIWISATA/DIV PARIWISATA	1	1	-	KEPALA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, KEPALA BIDANG PEMASARAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SDM KEPARIWISATAAN
38	PENYUSUN RENCANA PENGENDALIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	S1 ILMU HUKUM/S1 EKONOMI PEMBANGUNAN/S1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN/DIV ILMU HUKUM/DIV EKONOMI PEMBANGUNAN	1	1	-	SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN II BIDANG EKONOMI PEMBANGUNAN, KEPALA BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN, KEPALA SUB BAGIAN PENGENDALIAN
39	PRANATA BENCANA	DIII EKONOMI MANAJEMEN/DIII MANAJEMEN ADMINISTRASI	1	1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KEPALA SEKSI KEDARURATAN DAN LOGISTIK

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	JENIS FORMASI		RENCANA PENEMPATAN
				UMUM	DISABILITAS	
40	VERIFIKATOR KEUANGAN	DIII AKUNTANSI/DIII EKONOMI MANAJEMEN/DIII MANAJEMEN PERKANTORAN	1	1	-	SEKRETARIS DAERAH, DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIMPUNG, KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

Keterangan :

Tanda *) untuk formasi umum yang bisa dilamar oleh penyandang disabilitas



a.n. BUPATI BATANG
 Sekretaris Daerah,
 Selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah

Drs. NASIKHIN, M.H.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19630403 198903 1 011

LAMPIRAN III
 PENGUMUMAN
 NOMOR 810/287/2019
 TENTANG
 SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN
 2019 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

RINCIAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2019
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. BATANG
 (BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI PANRB NOMOR 82 TAHUN 2019)

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	JENIS FORMASI		RENCANA PENEMPATAN
				UMUM	DISABILITAS	
JUMLAH SELURUHNYA			156	149	1	
I. TENAGA PENDIDIKAN			50			
1	AHLI PERTAMA – GURU BIMBINGAN KONSELING	S1 BIMBINGAN KONSELING	3	1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, KEPALA SMPN 1 BANDAR, GURU BIMBINGAN KONSELING
				1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, KEPALA SMPN 1 KANDEMAN, GURU BIMBINGAN KONSELING
				1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, KEPALA SMPN 1 BANYUPUTIH, GURU BIMBINGAN KONSELING
2	AHLI PERTAMA – GURU KELAS	S1 PGSD / S1 PGMI	41	1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, KORWIL BID. PENDIDIKAN KEC. WARUNGASEM, KEPALA SDN PESAREN 01, GURU KELAS

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	JENIS FORMASI		RENCANA PENEMPATAN
				UMUM	DISABILITAS	
				1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, KORWIL BID. PENDIDIKAN KEC. WARUNGASEM, KEPALA SDN MENGUNENG 01, GURU KELAS
				1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, KORWIL BID. PENDIDIKAN KEC. WARUNGASEM SDN CEPAGAN 02, GURU KELAS
				1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, KORWIL BID. PENDIDIKAN KEC. TULIS, KEPALA SDN MANGGIS, GURU KELAS
				1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, KORWIL BID. PENDIDIKAN KEC. TULIS, KEPALA SDN KEBUMEN, GURU KELAS
				1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, KORWIL BID. PENDIDIKAN KEC. TULIS, KEPALA SDN SIBERUK, GURU KELAS
				1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, KORWIL BID. PENDIDIKAN KEC. BATANG, KEPALA SDN KARANGASEM 06, GURU KELAS
				-	1	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, KORWIL BID. PENDIDIKAN KEC. BATANG, KEPALA SDN PROYONANGGAN 13, GURU KELAS
				1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, KORWIL BID. PENDIDIKAN KEC. REBAN, KEPALA SDN CABLIKAN, GURU KELAS

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	JENIS FORMASI		RENCANA PENEMPATAN
				UMUM	DISABILITAS	
				1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, KORWIL BID. PENDIDIKAN KEC. REBAN, KEPALA SDN KUMESU 01, GURU KELAS
				1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, KORWIL BID. PENDIDIKAN KEC. REBAN, KEPALA SDN NGADIREJO 02, GURU KELAS
				1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, KORWIL BID. PENDIDIKAN KEC. REBAN, KEPALA SDN SUKOMANGLI 01, GURU KELAS
				1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, KORWIL BID. PENDIDIKAN KEC. PECALUNGAN, KEPALA SDN SIGUCI, GURU KELAS
				1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, KORWIL BID. PENDIDIKAN KEC. PECALUNGAN, KEPALA SDN PRETEK 01, GURU KELAS
				1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, KORWIL BID. PENDIDIKAN KEC. PECALUNGAN, KEPALA SDN GEMUH 01, GURU KELAS
				1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, KORWIL BID. PENDIDIKAN KEC. PECALUNGAN, KEPALA SDN GEMUH 03, GURU KELAS
				1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, KORWIL BID. PENDIDIKAN KEC. PECALUNGAN, KEPALA SDN RANDU 01, GURU KELAS

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	JENIS FORMASI		RENCANA PENEMPATAN
				UMUM	DISABILITAS	
				1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, KORWIL BID. PENDIDIKAN KEC. LIMPUNG, KEPALA SDN PUNGANGAN 01, GURU KELAS
				1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, KORWIL BID. PENDIDIKAN KEC. LIMPUNG, KEPALA SDN ROWOSARI, GURU KELAS
				1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, KORWIL BID. PENDIDIKAN KEC. LIMPUNG, KEPALA SDN SIDOMULYO 01, GURU KELAS
				1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, KORWIL BID. PENDIDIKAN KEC. KANDEMAN, KEPALA SDN DEPOK 02, GURU KELAS
				1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, KORWIL BID. PENDIDIKAN KEC. KANDEMAN, KEPALA SDN UJUNGNEGORO 01, GURU KELAS
				1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, KORWIL BID. PENDIDIKAN KEC. KANDEMAN, KEPALA SDN BAKALAN, GURU KELAS
				1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, KORWIL BID. PENDIDIKAN KEC. GRINGSING, KEPALA SDN MENTOSARI, GURU KELAS
				1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, KORWIL BID. PENDIDIKAN KEC. GRINGSING, KEPALA SDN LEBO 01, GURU KELAS

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	JENIS FORMASI		RENCANA PENEMPATAN
				UMUM	DISABILITAS	
				1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, KORWIL BID. PENDIDIKAN KEC. GRINGSING, KEPALA SDN KEBONDALEM 02, GURU KELAS
				1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, KORWIL BID. PENDIDIKAN KEC. GRINGSING, KEPALA SDN SIDOREJO 01, GURU KELAS
				1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, KORWIL BID. PENDIDIKAN KEC. SUBAH, KEPALA SDN MANGUNHARJO 01, GURU KELAS
				1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, KORWIL BID. PENDIDIKAN KEC. SUBAH, KEPALA SDN DURENOMBO 01, GURU KELAS
				1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, KORWIL BID. PENDIDIKAN KEC. SUBAH, KEPALA SDN KURIPAN 02, GURU KELAS
				1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, KORWIL BID. PENDIDIKAN KEC. SUBAH, KEPALA SDN SUBAH 04, GURU KELAS
				1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, KORWIL BID. PENDIDIKAN KEC. SUBAH, KEPALA SDN KEMIRI 06, GURU KELAS
				1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, KORWIL BID. PENDIDIKAN KEC. SUBAH, KEPALA SDN DURENOMBO 02, GURU KELAS

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	JENIS FORMASI		RENCANA PENEMPATAN
				UMUM	DISABILITAS	
				1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, KORWIL BID. PENDIDIKAN KEC. BANDAR, KEPALA SDN CANDI, GURU KELAS
				1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, KORWIL BID. PENDIDIKAN KEC. BLADO, KEPALA SDN WONOBODRO 01, GURU KELAS
				1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, KORWIL BID. PENDIDIKAN KEC. BANYUPUTIH, KEPALA SDN BULU 02, GURU KELAS
				1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, KORWIL BID. PENDIDIKAN KEC. WONOTUNGGAL, KEPALA SDN SILURAH 01, GURU KELAS
				1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, KORWIL BID. PENDIDIKAN KEC. WONOTUNGGAL, KEPALA SDN GRINGGINGSARI, GURU KELAS
				1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, KORWIL BID. PENDIDIKAN KEC. BANYUPUTIH, KEPALA SDN KALANGSONO 01, GURU KELAS
				1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, KORWIL BID. PENDIDIKAN KEC. BAWANG, KEPALA SDN WONOSARI 01, GURU KELAS
				1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, KORWIL BID. PENDIDIKAN KEC. BAWANG, KEPALA SDN SIBEBEK, GURU KELAS

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	JENIS FORMASI		RENCANA PENEMPATAN
				UMUM	DISABILITAS	
3	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	S1 PENJASORKES	6	1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, KORWIL BID. PENDIDIKAN KEC. WARUNGASEM, KEPALA SDN SIJONO, GURU PENJASORKES
				1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, KORWIL BID. PENDIDIKAN KEC. TERSONO, KEPALA SDN SIDALANG 01, GURU PENJASORKES
				1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, KORWIL BID. PENDIDIKAN KEC. REBAN, KEPALA SDN PACET, GURU PENJASORKES
				1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, KORWIL BID. PENDIDIKAN KEC. BANDAR, KEPALA SDN BATIOMBO 02, GURU PENJASORKES
				1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, KORWIL BID. PENDIDIKAN KEC. BLADO, KEPALA SDN GERLANG, GURU PENJASORKES
				1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, KORWIL BID. PENDIDIKAN KEC. BAWANG, KEPALA SDN PRANTEN 01, GURU PENJASORKES

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	JENIS FORMASI		RENCANA PENEMPATAN
				UMUM	DISABILITAS	
II. TENAGA KESEHATAN			19			
1	AHLI PERTAMA – ADMINISTRATOR KESEHATAN	DIV KESEHATAN MASYARAKAT/S1 KESEHATAN MASYARAKAT	1	1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KESEHATAN, ADMINISTRATOR KESEHATAN
2	AHLI PERTAMA - DOKTER	DOKTER UMUM	2	2	-	SEKRETARIS DAERAH, DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG, DOKTER
3	AHLI PERTAMA – ENTOMOLOG KESEHATAN	DIV KESEHATAN MASYARAKAT / S1 KESEHATAN MASYARAKAT	2	2	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KESEHATAN, ENTOMOLOG KESEHATAN
4	AHLI PERTAMA – EPIDEMIOLOG KESEHATAN	S1 EPIDEMIOLOGI	2	2	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KESEHATAN, EPIDEMIOLOG KESEHATAN
5	AHLI PERTAMA – PEMBIMBING KESEHATAN KERJA	DIV KESEHATAN MASYARAKAT/S1 KESEHATAN MASYARAKAT	1	1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KESEHATAN, PEMBIMBING KESEHATAN KERJA
6	AHLI PERTAMA – PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	DIV KESEHATAN MASYARAKAT/S1 KESEHATAN MASYARAKAT	1	1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KESEHATAN, PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT
7	PELAKSANA/TERAMPIL – PEREKAM MEDIS	DIII PEREKAM MEDIS	10	1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KESEHATAN, KEPALA PUSKESMAS BATANG 1, PEREKAM MEDIS
				1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KESEHATAN, KEPALA PUSKESMAS WARUNGASEM, PEREKAM MEDIS

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	JENIS FORMASI		RENCANA PENEMPATAN
				UMUM	DISABILITAS	
				1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KESEHATAN, KEPALA PUSKESMAS WONOTUNGGAL, PEREKAM MEDIS
				1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KESEHATAN, KEPALA PUSKESMAS BANDAR 1, PEREKAM MEDIS
				1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KESEHATAN, KEPALA PUSKESMAS BLADO 1, PEREKAM MEDIS
				1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KESEHATAN, KEPALA PUSKESMAS REBAN, PEREKAM MEDIS
				1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KESEHATAN, KEPALA PUSKESMAS TERSONO, PEREKAM MEDIS
				1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KESEHATAN, KEPALA PUSKESMAS GRINGSING 1, PEREKAM MEDIS
				1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KESEHATAN, KEPALA PUSKESMAS BANYUPUTIH, PEREKAM MEDIS
				1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KESEHATAN, KEPALA PUSKESMAS SUBAH, PEREKAM MEDIS
III. TENAGA TEKNIS			87			
1	AHLI PERTAMA – ANALIS KETAHANAN PANGAN	S1 TEKNOLOGI PANGAN/DIV TEKNOLOGI PANGAN	3	3	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN, ANALIS KETAHANAN PANGAN
2	AHLI PERTAMA – ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN	S1 PERIKANAN/DIV PERIKANAN	1	1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN, ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	JENIS FORMASI		RENCANA PENEMPATAN
				UMUM	DISABILITAS	
3	AHLI PERTAMA – ARSIPARIS	S1 KEARSIPAN / DIV KEARSIPAN	2	2	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP, ARSIPARIS
4	AHLI PERTAMA – INSTRUKTUR	S1 TEKNIK KOMPUTER / DIV TEKNIK KOMPUTER	2	1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN, UPT BALAI LATIHAN KERJA, INSTRUKTUR
		S1 OTOMOTIF / S1 TEKNIK MESIN / DIV TEKNIK MESIN		1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN, UPT BALAI LATIHAN KERJA, INSTRUKTUR
5	AHLI PERTAMA – PAMONG BELAJAR	S1 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH	1	1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PAMONG BELAJAR
6	AHLI PERTAMA – PAMONG BUDAYA	S1 ILMU SEJARAH / S1 ANTROPOLOGI / DIV ANTROPOLOGI	1	1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PAMONG BUDAYA
7	AHLI PERTAMA – PEKERJA SOSIAL	DIV KESEJAHTERAAN SOSIAL / S1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	2	2	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS SOSIAL, PEKERJA SOSIAL
8	AHLI PERTAMA – PENGANTAR KERJA	S1 PSIKOLOGI / DIV PSIKOLOGI	2	2	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN, KEPALA BIDANG PELATIHAN, PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, KEPALA SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, PENGANTAR KERJA
9	AHLI PERTAMA – PENGAWAS KEMETROLOGIAN	S1 MIPA FISIKA / S1 MIPA MATEMATIKA / S1 TEKNIK FISIKA / S1 TEKNIK ELEKTRONIKA / S1 TEKNIK INDUSTRI	1	1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, KEPALA BIDANG PERDAGANGAN, KEPALA SEKSI METROLOGI LEGAL, PENGAWAS KEMETROLOGIAN

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	JENIS FORMASI		RENCANA PENEMPATAN
				UMUM	DISABILITAS	
10	AHLI PERTAMA – PENGELOLA KESEHATAN IKAN	S1 BUDIDAYA PERIKANAN/S1 BUDIDAYA PERAIRAN / DIV BUDIDAYA PERAIRAN/DIV BUDIDAYA PERIKANAN	1	1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN, PENGELOLA KESEHATAN IKAN
11	AHLI PERTAMA – PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN	S1 BUDIDAYA PERIKANAN/S1 BUDIDAYA PERAIRAN / DIVBUDIDAYA PERIKANAN/DIV BUDIDAYA PERAIRAN	1	1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN, PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN
12	AHLI PERTAMA – PENYULUH SOSIAL	DIV KESEJAHTERAAN SOSIAL/S1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	2	2 *)	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS SOSIAL, PENYULUH SOSIAL
13	AHLI PERTAMA – PERENCANA	S1 EKONOMI PEMBANGUNAN/DIV PLANOLOGI/S1 PLANOLOGI/DIV EKONOMI PEMBANGUNAN	3	3	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PERENCANA
14	AHLI PERTAMA – PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S1 HUBUNGAN MASYARAKAT/S1 ILMU KOMUNIKASI / DIV ILMU KOMUNIKASI/DIV HUBUNGAN MASYARAKAT	2	1	-	SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN III BIDANG ADMINISTRASI, KEPALA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT, KEPALA SUB BAGIAN DOKUMENTASI INFORMASI DAN PUBLIKASI, PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	JENIS FORMASI		RENCANA PENEMPATAN
				UMUM	DISABILITAS	
				1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEPALA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK, KEPALA SEKSI KEMITRAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK, PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT
15	AHLI PERTAMA – PRANATA KOMPUTER	S1/DIV SISTEM INFORMASI	2	1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERMENT, KEPALA SEKSI INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI, PRANATA KOMPUTER
		S1/DIV TEKNIK INFORMATIKA		1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERMENT, KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN APLIKASI DAN TATA KELOLA E-GOVERMENT, PRANATA KOMPUTER
16	AHLI PERTAMA – TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN	S1/DIV TEKNIK SIPIL	2	2	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN
17	AHLI PERTAMA – TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN	S1/DIV TEKNIK SIPIL/S1/DIV TEKNIK ARSITEKTUR	3	1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN
		S1/DIV TEKNIK SIPIL/S1/DIV TEKNIK ARSITEKTUR / S1 PLANOLOGI / DIV PLANOLOGI		2	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	JENIS FORMASI		RENCANA PENEMPATAN
				UMUM	DISABILITAS	
18	PELAKSANA PEMULA/PEMULA – ASISTEN PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	SMK PERIKANAN / SMK KELAUTAN	5	5	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN, ASISTEN PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP
19	PELAKSANA/TERAMPIL – ANALIS KEPEGAWAIAN	DIII MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA / DIII MANAJEMEN ADMINISTRASI	6	1	-	SEKRETARIS DAERAH, DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIMPUNG, ANALIS KEPEGAWAIAN
				1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KESEHATAN, ANALIS KEPEGAWAIAN
				3	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, ANALIS KEPEGAWAIAN
				1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN, ANALIS KEPEGAWAIAN
20	PELAKSANA/TERAMPIL – ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN	DIII AGRIBISNIS/DIII SOSIAL EKONOMI PERTANIAN	1	1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN, ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN
21	PELAKSANA/TERAMPIL – ARSIPARIS	DIII KEARSIPAN	2	2	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA, KEPALA SEKSI PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, ARSIPARIS

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	JENIS FORMASI		RENCANA PENEMPATAN
				UMUM	DISABILITAS	
22	PELAKSANA/TERAMPIL – OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DIII KOMPUTER	15	15	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN PENDAFTARAN PENDUDUK, KEPALA SEKSI IDENTITAS PENDUDUK, OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
23	PELAKSANA/TERAMPIL – PENERA	DIII METROLOGI	2	2	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, KEPALA BIDANG PERDAGANGAN, KEPALA SEKSI METROLOGI LEGAL, PENERA
24	PELAKSANA/TERAMPIL – PENGAWAS BIBIT TERNAK	DIII PETERNAKAN	2	2	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN, PENGAWAS BIBIT TERNAK
25	PELAKSANA/TERAMPIL – PENGAWAS MUTU PAKAN	DIII PETERNAKAN	2	2	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN, PENGAWAS MUTU PAKAN
26	PELAKSANA/TERAMPIL – PENGAWAS PERIKANAN (PENGGABUNGAN DGN PENGAWAS BENIH IKAN)	DIII PERIKANAN	1	1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN, PENGAWAS PERIKANAN (PENGGABUNGAN DGN PENGAWAS BENIH IKAN)
27	PELAKSANA/TERAMPIL – PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN	DIII BIDIDAYA PERIKANAN / DIII BUDIDAYA PERAIRAN	1	1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN, PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN
28	PELAKSANA/TERAMPIL – PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR	DIII PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR	1	1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KEPALA BIDANG KESELAMATAN DAN TEKNIK SARANA, KEPALA SEKSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR, PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	JENIS FORMASI		RENCANA PENEMPATAN
				UMUM	DISABILITAS	
29	PELAKSANA/TERAMPIL – PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	DIII HUBUNGAN MASYARAKAT	1	1	-	SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN III BIDANG ADMINISTRASI, KEPALA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT, KEPALA SUB BAGIAN DOKUMENTASI INFORMASI DAN PUBLIKASI, PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT
30	PELAKSANA/TERAMPIL – PRANATA KOMPUTER	DIII TEKNIK INFORMATIKA	3	2 *)	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, KEPALA BIDANG MUTASI DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN, KEPALA SUB BIDANG INFORMASI KEPEGAWAIAN, PRANATA KOMPUTER
		DIII TEKNIK INFORMATIKA / DIII MANAJEMEN INFORMATIKA / DIII TEKNIK KOMPUTER		1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PRANATA KOMPUTER
31	PELAKSANA/TERAMPIL – PUSTAKAWAN	DII PERPUSTAKAAN	2	1 *)	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP, PUSTAKAWAN
		DIII PERPUSTAKAAN		1 *)	-	SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, KEPALA BAGIAN HUKUM, KEPALA SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN SOSIALISASI HUKUM, PUSTAKAWAN
32	PELAKSANA/TERAMPIL – STATISTISI	DIII STATISTIKA	1	1	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEPALA BIDANG LAYANAN INFORMASI DAN STATISTIK, KEPALA SEKSI STATISTIK, STATISTISI

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	JENIS FORMASI		RENCANA PENEMPATAN
				UMUM	DISABILITAS	
33	PELAKSANA/TERAMPIL – TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN	DIII TEKNIK SIPIL	5	5	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN
34	PELAKSANA/TERAMPIL – TEKNIK PENGAIRAN	DIII TEKNIK SIPIL / DII TEKNIK ARSITEKTUR	2	2	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, TEKNIK PENGARIRAN
35	PELAKSANA/TERAMPIL – TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN	DIII KESEHATAN LINGKUNGAN / DIII TEKNIK LINGKUNGAN	2	2	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN
36	PELAKSANA/TERAMPIL – TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN	DIII TEKNIK SIPIL / DIII TEKNIK ARSITEKTUR	2	2	-	SEKRETARIS DAERAH, KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN

Keterangan :

Tanda *) untuk formasi umum yang bisa dilamar oleh penyandang disabilitas

a.n. BUPATI BATANG

Sekretaris Daerah,

Sebagai Ketua Panitia Seleksi Daerah



Drs. NASIKHIN, M.H.

Pembina Utama Madya

NIP. 19630403 198903 1 011